



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, SENIN 26 AGUSTUS 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

PKPU Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

Kaesang Gagal Nyalon di Pilgub, Tapi Masih Bisa Maju Wali Kota

Jakarta-HARIAN BANGSA
Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Dollir Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu



Suasana rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR tentang penelaahan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

↳ Bersambung ke Hal. 11



HAMPIR SELESAI: Petugas mengerjakan berem pada betonisasi ruas Jalan Raya Masangan Wetan, Sukodono, akhir pekan lalu.

Sebagian Ruas Jalan Masangan Wetan Dibuka

oyek Betonisasi Selesai Bulan Depan

SIDOARJO - Betonisasi ruas Jalan Raya Masangan Wetan, Sukodono, sepanjang 2,65 kilometer telah memasuki fase akhir. Sebagian besar ruas jalan itu mulai dibuka. Ditargetkan, proyek tersebut selesai total pada September.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sejauh ini penutupan hanya berlaku untuk kendaraan besar karena masih menunggu usia kematangan beton sempurna. "Pekerjaan mayor seperti pengecoran minggu ini sudah tuntas semuanya," katanya.

Dengan begitu, motor maupun mobil kecil sudah bisa melintas. Saat ini petugas masih merapikan jalan. Mulai menyesuaikan ketinggian jalan hingga mengerjakan berem di pinggir jalan. "Tinggal merapikan sehingga pertengahan September sudah tuntas 100 persen," ujarnya.

Untuk mempercepat pekerjaan, DPUBMSDA meng-

nakan lantai kerja berupa aspal, baru ditutup beton. Tidak menggunakan lean concrete (LC) dari beton. "Jadi lebih cepat, tidak perlu menunggu LC kering yang butuh sehari-hari," jelasnya.

Lewat metode tersebut, pengerjaan betonisasi bisa lebih cepat. "Prinsipnya, jika umur beton sudah mencukupi, kendaraan bisa lewat selama tidak mengganggu proses pengerjaan," jelasnya.

Selama ditutup, jalur tersebut kerap mengalami kemacetan. Bahkan, saat situasi padat, antrean kendaraan bisa mencapai 2 kilometer. (uzi/c7/ris)



KERJASAMA: Penandatanganan kerjasama BUMD dan BUMD dalam pengelolaan sampah

Pemkab Tandatangani Kerjasama BUMN dan BUMD dalam Pengelolaan Sampah

SIDOARJO (BN) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menandatangani perjanjian kerjasama BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sampah.

Hal ini mendahului Sesi Keempat Kerjasama Tim Nasional Seharas PK tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, salah satunya adalah Penguatan Penguasaan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN-BUMD).

Untuk mewujudkan pelaksanaan aksi ini, Satuan PK menandatangani kerjasama BUMN dan BUMD melalui kerjasama pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.

Kabupaten Sidoarjo termasuk 7 pemerintah daerah yang turut dalam acara tersebut. Pemerintah daerah yang diundang ini dinilai telah berhasil menjadi produk hasil obahan sampah melalui HOF (Hofas Derived Fuel).

Atas nama penandatangan Kabupaten Sidoarjo, Plt. Bupati Sidoarjo H. Sihand SH, M.Kn menandatangani perjanjian Kerjasama BUMN dan BUMD, Kamis (22/8) pada sektor pengelolaan sampah, di Gedung Lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta selatan. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pemb-

Kabupaten Sidoarjo. Penandatanganan Kerjasama Bersama oleh Plt. Bupati Sidoarjo (Pemer) Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan hasil pengobahan sampah.

Koordinator Satuan PK, Pihala Nainggaha, yang juga Deputy Pengarah dan Monitoring KPK RI, mengatakan perjanjian pelaksanaan ini mencakup 4 dari aksi Program Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Aksi ini diarahkan pada belum optimalnya proses penanganan terdapat badan usaha pemerintah.

Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN, untuk mengaktifkan kembali Kerjasama BUMN dan BUMD disamping diarahkan.

Pertandatangan dan Pengobahan sampah masih menjadi isu krusial bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Terutama untuk pengelolaan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia belum tertangani secara keseluruhan dengan baik. Pengobahan sampah masih banyak berakhir dengan

POLITIK



Kantor KPU RI.

KPU Tetapkan Delapan Parpol Lolos ke DPR PDIP Raih 110 Kursi, Golkar 102 Kursi

Jakarta-HARIAN BANGSA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan partai yang lolos ambang batas perolehan suara sah secara nasional sehingga mendapat kursi di DPR RI. Kedelapan partai ini ialah PDIP, PKB, Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Demokrat.

↳ Bersambung ke Hal. 11

• PKPU...

Sambungan dari halaman 1

tidak menyetujui jajak pendapat masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah yang di dalamnya mengkompromikan putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tidak memaksakan kerangka lagi.

"Kami sudah menghimbau jajak pendapat, tidak ada lagi kerangka yang pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih selaras. Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI. Rapat tersebut membahas agenda tentang pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengkomodifikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024. Doli mengatakan disetujui rancangan PKPU yang mengkomodifikasi putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada ditolakan DPR RI.

"Jika, insyaallah tidak ada lagi kerangka, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap tentang pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Dalil vamp Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam dapat disetujui oleh Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang disetujui pada 2024.

"Tadi kerangka Pk Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segmen diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu putusan MK agar di komodifikasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita mengabdikan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10:00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mocharrom Afiduddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Hedy Lugi, Menteri Hukum dan HAM Supranan Andi Agus, dan Wakil Ketua KPU Mocharrom Afiduddin. Rapat tersebut membahas Rancangan PKPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengkomodifikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai quorum yang sesuai untuk masa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislatif DPR dan pemerintah. Pembahasan ini dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan Pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU-XII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XII/2024 mengubah batas batas pencalonan partai politik atau mengizinkan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XII/2024 mengizinkan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah diubah sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan ini menggugurkan tathis putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum yang mengubah bahwa batas usia ini diubah sejak pasangan calon terpilih diumumkan.

Ketua KPU RI Mocharrom Afiduddin mengatakan, mengubah batas usia ini akan segera diundangkan. Setelah itu kita sampaikan ke publik," kata Afiduddin di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).

Afiduddin mengesahkan seluruh usulan yang KPU dengan hasil keputusan MK telah disampaikan ke DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat (RDP).

"Intinya, semua usulan KPU soal perubahan untuk menggodiputuskan MK 60 dan 70 sudah dilakukan dan sudah diterima seluruhnya," kata Afiduddin.

Afiduddin meyakini masyarakat bahwa penyelenggara pemilu dalam waktu singkat akan mengesahkan PKPU Pilkada.

"Setelah harmonisasi, insya Allah secepatnya karena memang kita ingin proses dilakukan secepatnya karena situasi dan kebutuhan pendafaran yang semakin dekat," tutur Afiduddin.

Sementara itu, putra bursu Presiden Jokowi yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangaripandjani mengatakan bahwa proses pengobahan ini akan selesai dalam 30 hari sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.

Sebelumnya, arak Jokowi ini dibatalkan akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai calon wali gubernur, mendampingi mantan Kepala Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lubis dalam ajang pemilihan kepala daerah pada 25 Desember 2024.

Meski gagal maju di Pilkada, Kaesang masih bisa mencalonkan diri sebagai Walikota atau Bupati. Menggodipada putusan terbaru MK, syarat batas usia calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 25 tahun, artinya Kaesang masih memenuhi kualifikasi untuk mendafarkan diri. (mo/det/cn/r/ok/m/an)

Tak Ada Seleksi CPNS, Hanya Rekrutmen PPPK

Siapkan 1.165 Formasi, Khusus untuk Honorer

SIDOARJO - Tahap rekrutmen CPNS 2024 tengah berlangsung di berbagai daerah. Tak hanya oleh lembaga vertikal, tapi juga di tingkat pemerintah daerah. Namun, seleksi CPNS tidak berlangsung di Sidoarjo.

Sebab, kabupaten ini tidak mengajukan penambahan CPNS. Tahun ini Pemkab hanya bakal menggelar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Seleksi itu pun hanya diperuntukkan para tenaga honorer Pemkab Sidoarjo.

Dalam seleksi PPPK tahun ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menyiapkan 1.165 formasi. "Sidoarjo tahun ini tidak membuka seleksi CPNS," kata Sekretaris BKD Sidoarjo Zainul Arifin Umar.

Sementara itu, untuk tahapan Kami memutuskan tidak membuka formasi CPNS dalam rangka mendahulukan penataan non-ASN." Farida Puspitasari Kabid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Sidoarjo dan jadwal seleksi PPPK, Pemkab masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Selain itu, pada seleksi PPPK di Sidoarjo kali ini, Pemkab menetapkan bahwa yang bisa ikut seleksi hanya pegawai honorer/pegawai non-PNS dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

"Jadi, tidak untuk pelamar umum," ujar Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Sidoarjo Farida Puspitasari. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai upaya penataan non-ASN. "Kami memutuskan tidak membuka formasi CPNS dalam rangka mendahulukan penataan non-ASN," jelasnya. Sebab, saat ini pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk merekrut non-ASN.

Sambil menunggu jadwal dari pemerintah pusat, pihaknya menggelar simulasi seleksi bagi para honorer yang akan mengikuti tes PPPK. (uzi/c7/ris)

Sebelumnya, arak Jokowi ini dibatalkan akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai calon wali gubernur, mendampingi mantan Kepala Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Lubis dalam ajang pemilihan kepala daerah pada 25 Desember 2024.

Meski gagal maju di Pilkada, Kaesang masih bisa mencalonkan diri sebagai Walikota atau Bupati. Menggodipada putusan terbaru MK, syarat batas usia calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 25 tahun, artinya Kaesang masih memenuhi kualifikasi untuk mendafarkan diri. (mo/det/cn/r/ok/m/an)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BMIST

KERJASAMA: Penandatanganan kerjasama BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sampah.

Pemkab Tandatangani Kerjasama BUMN dan BUMD dalam Pengelolaan Sampah

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menandatangani perjanjian kerjasama BUMN dan BUMD dalam pengelolaan sampah.

Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Stranas PK tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, salah satunya adalah Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN-BUMD). Untuk mewujudkan pelaksanaan aksi ini Stranas PK mendorong sinergitas BUMN dan BUMD melalui kerjasama pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.

Kabupaten Sidoarjo termasuk 7 pemerintah daerah yang turut dalam acara tersebut. Pemerintah daerah yang diundang ini dinilai telah berhasil menjual produk hasil olahan sampah melalui RDF (Refuse Derived Fuel).

Atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH., M.Kn menandatangani perjanjian Kerjasama BUMN dan BUMD, Kamis (22/8) pada sektor pengelolaan sampah, di Gedung Juang Lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta selatan. Turut hadir Asisten

Kabupaten Sidoarjo.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah.

Koordinator Stranas PK, Pahala Nainggolan, yang juga Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Kegiatan ini merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD). Aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah. Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN, untuk mengajak lebih banyak Kerjasama BUMN BUMD diseluruh daerah di Indonesia.

Pertambangan dan Pengolahan sampah masih menjadi isu krusial bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Terutama untuk pengolahan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia belum tertangani secara keseluruhan dengan baik. Pengolahan sampah pembakaran sampah terbuka, dikubur ataupun dibuang bebas

yang akan bermuara ke laut.

Oleh karena itu, Stranas PK menekankan pengimplementasiannya di 2 sektor yaitu sektor pertambangan yang dinilai rentan praktik korupsi serta sektor pengolahan sampah yang merupakan isu krusial dan juga merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia.

Untuk sektor pengolahan sampah Stranas PK menekankan prinsip sekali dayung dua tiga pulau terlampaui dimana permasalahan sampah teratasi dan BUMD diberdayakan dalam mengolah energi terbarukan.

Sementara itu, Plt. Bupati Sidoarjo Subandi ditemui sesuai penandatanganan perjanjian, mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah harus didasarkan pada asas tanggungjawab, keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas ekonomi, dan asas kesadaran. "Tugas pemerintah daerah, menjamin adanya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan," jelas Subandi.

Ia optimis bahwa, penandatanganan kerjasama ini akan membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Kolaborasi ini adalah komitmen kita untuk membangun lingkungan yang lebih baik. (adv/udi)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

CS

© 2024 Berita Metro

THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro

Tak Ada Seleksi CPNS, Hanya Rekrutmen PPPK

Siapkan 1.165 Formasi, Khusus untuk Honorer

SIDOARJO - Tahap rekrutmen CPNS 2024 tengah berlangsung di berbagai daerah. Tak hanya oleh lembaga vertikal, tapi juga di tingkat pemerintah daerah. Namun, seleksi CPNS tidak berlangsung di Sidoarjo.

Sebab, kabupaten ini tidak mengajukan penambahan CPNS. Tahun ini pemkab ha-

nya bakal menggelar rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Seleksi itu pun hanya diperuntukkan para tenaga honorer Pemkab Sidoarjo.

Dalam seleksi PPPK tahun ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menyiapkan 1.165 formasi. "Sidoarjo tahun ini tidak membuka seleksi CPNS," kata Sekretaris BKD Sidoarjo Zainul Arifin Umar.

Sementara itu, untuk tahapan



Kami memutuskan tidak membuka formasi CPNS dalam rangka mendahulukan penataan non-ASN."

FARIDA PUSPITASARI
Kabid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Sidoarjo

dan jadwal seleksi PPPK, pemkab masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

Selain itu, pada seleksi PPPK di Sidoarjo kali ini, pemkab menetapkan bahwa yang bisa ikut seleksi hanya pegawai honorer/pegawai non-PNS dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

"Jadi, tidak untuk pelamar umum," ujar Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Sidoarjo Farida Puspitasari. Kebijakan tersebut ditetapkan

sebagai upaya penataan non-ASN. "Kami memutuskan tidak membuka formasi CPNS dalam rangka mendahulukan penataan non-ASN," jelasnya. Sebab, saat ini pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk merekrut non-ASN.

Sambil menunggu jadwal dari pemerintah pusat, pihaknya menggelar simulasi seleksi bagi para honorer yang akan mengikuti tes PPPK. (**uzi/c7/ris**)

Siapa yang bilang...

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



FIRMA ZUHDI JAWA POS

HAMPIR SELESAI:
Petugas mengerjakan berem pada betonisasi ruas Jalan Raya Masangan Wetan, Sukodono, akhir pekan lalu.

Sebagian Ruas Jalan Masangan Wetan Dibuka

Proyek Betonisasi Selesai Bulan Depan

SIDOARJO - Betonisasi ruas Jalan Raya Masangan Wetan, Sukodono, sepanjang 2,65 kilometer telah memasuki fase akhir. Sebagian besar ruas jalan itu mulai dibuka. Ditargetkan, proyek tersebut selesai total pada September.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, sejauh ini penutupan hanya berlaku untuk

kendaraan besar karena masih menunggu usia kematangan beton sempurna. "Pekerjaan mayor seperti pengecoran minggu ini sudah tuntas semuanya," katanya.

Dengan begitu, motor maupun mobil kecil sudah bisa melintas. Saat ini petugas masih merapikan jalan. Mulai menyesuaikan ketinggian jalan hingga mengerjakan *berem* di pinggir jalan. "Tinggal merapikan sehingga pertengahan September sudah tuntas 100 persen," ujarnya.

Untuk mempercepat pekerjaan, DPUBMSDA menggu-

nakan lantai kerja berupa aspal, baru ditutup beton. Tidak menggunakan *lean concrete* (LC) dari beton. "Jadi lebih cepat, tidak perlu menunggu LC kering yang butuh berhari-hari," jelasnya.

Lewat metode tersebut, pengerjaan betonisasi bisa lebih cepat. "Prinsipnya, jika umur beton sudah mencukupi, kendaraan bisa lewat selama tidak mengganggu proses pengerjaan," jelasnya.

Selama ditutup, jalur tersebut kerap mengalami kemacetan. Bahkan, saat situasi padat, antrian kendaraan bisa mencapai 2 kilometer. (uzi/c7/ris)

CS Dipindai dengan CamScanner

Jawa Pos

Pemancing di Desa Boro Rebutan Hadiah Ratusan Juta

Sebar 10 Ton Ikan Lele

TANGGULANGIN-Pemdes Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin menyelenggarakan lomba mancing dengan hadiah total mencapai Rp 108 juta. Tak hanya itu, panitia juga menyediakan doorprize berupa satu unit sepeda motor untuk peserta.

Kegiatan itu menarik perhatian ribuan warga. Mereka langsung memenuhi pesisir sungai lokasi lomba pemancingan.

Dalam pantauan Radar Sidoarjo, terlihat suasana meriah di lokasi lomba. Ribuan peserta tampak bersemangat mengikutsertakan diri dalam lomba mancing yang digelar. Mereka tampak sangat menikmati kegiatan, menunjukkan antusiasme dari masyarakat.

Sekretaris Desa Boro, Fajar Mardianto mengatakan, pihaknya memilih lomba mancing karena untuk memanfaatkan potensi alam. Dimana di Desa Boro potensi paling kuat adalah sungai itu sendiri.

"Warga sangat senang, dimana lombanya saja gratis ditambah hadiahnya yang fantastis," ucapnya, Minggu, (25/8).

"Kegiatan ini nantinya dapat menghidupkan perekonomian masyarakat,"



SEMARAK : Warga terlihat sangat antusias mengikuti lomba mancing di Desa Boro.

imbuhnya.

Ketua Panitia Lomba Mancing, H Abdurrohman menjelaskan, lomba tersebut merupakan agenda tahunan yang digelar untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kegiatan lomba mancing ini sudah kami gelar sejak tahun 2016, jadi sudah sekitar delapan hingga sembilan tahun," jelasnya.

Sejak dimulai, lomba tahunan itu terus menga-

lami perkembangan signifikan dalam hal peserta dan hadiah. Hal itu menunjukkan, lomba sangat dinanti dan disambut baik oleh masyarakat Desa Boro. "Dulu lomba ini diikuti dengan peserta sekitar 1.000 orang, sekarang, jumlah peserta telah mencapai sekitar 2.100 orang," ungkapnya.

Hadiah lomba juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana

untuk hadiah juara pertama adalah Rp 50 juta, juara kedua Rp 20 juta, dan juara ketiga Rp 10 juta selebihnya untuk posisi di bawahnya juga tidak kalah menarik.

Panitia menyiapkan ikan lele dalam jumlah besar, sekitar delapan hingga 10 ton, yang ditebar di kali untuk lomba. Ikan yang disediakan termasuk ikan lele dengan bobot terbesar mencapai 10

kilogram.

Dengan besarnya ikan yang ditebar, memberikan tantangan bagi para peserta yang turut memiahkan lomba. Untuk anggarannya sendiri berasal dari donasi warga Desa Boro.

"Alhamdulillah, kegiatan tahun ini lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, warga sangat antusias," tutupnya. (sai/vga)

www.radar-sidoarjo.com

Pilkada Sidoarjo 2024, 29.046 Pemilih Pemula

SIDOARJO - Sebanyak 29.046 pemilih pemula yang berusia 17 tahun akan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam Pilkada Sidoarjo pada 27 November 2024 mendatang. Pemilih pemula ini diambil dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah ditetapkan oleh KPU Sidoarjo.

"Tentunya Pilkada tahun ini menjadi pengalaman pertama dalam sejarah hidup mereka untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu," ujar Komisioner KPU Sidoarjo, Nasirudin Yahya, dalam sambutannya di acara sosialisasi pendidikan pemilih di Aula Bakesbangpol Sidoarjo, Sabtu (24/8/24).

Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri anggota HMI Cabang Sidoarjo tersebut, Nasirudin menambahkan bahwa dari total pemilih pemula tersebut, beberapa di antaranya adalah anggota HMI Cabang Sidoarjo.

"Saya yakin ada nama-nama anggota HMI Sidoarjo di sana. Oleh karena itu, saya mengajak adik-adik sekalian untuk hadir dan memberikan hak suaranya dalam Pilkada serentak pada 27

November 2024," katanya.

Nasir juga menjelaskan kepada peserta sosialisasi agar memastikan hak pilih mereka, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan serentak 2024. "Cek di Balai Desa atau Kelurahan masing-masing atau lewat website cekdptonline.kpu.go.id," jelasnya.

Selain itu, KPU Sidoarjo juga berharap pemilihan nanti dapat berjalan dengan aman, damai, dan tanpa konflik.

Senada pemateri Nanang Haromain, bahwa masyarakat Sidoarjo dikenal dewasa dalam berpolitik. "Warga Sidoarjo tidak pernah memiliki sejarah buruk dalam pelaksanaan pilkada, tentunya hal ini tidak lepas dari kinerja baik dari penyelenggara pemilu," ungkapnya.

Ia juga mengajak peserta sosialisasi untuk mempelajari rekam jejak dari masing-masing calon kepala daerah. "Jejak digital masing-masing calon memberikan gambaran sampai sejauh mana masa depan Kabupaten Sidoarjo ke depan," ujarnya.

Dalam kegiatan yang sama, Yuristiarso Hidayat, S.Sos., M.H., pengurus PWI Jawa Timur, menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Pers berfungsi sebagai kontrol terhadap ketiga pilar tersebut dengan menjalankan prinsip checks and balances," ungkapnya. • **Loe**



Nasirudin Yahya, dalam sambutannya di sosialisasi pendidikan pemilih di Aula Bakesbangpol Sidoarjo, Sabtu (24/8/24)

Yuristiarso Hidayat, S.Sos., M.H., pengurus PWI Jawa Timur, menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting

sebagai pilar keempat demokrasi, setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Pers berfungsi sebagai

kontrol terhadap ketiga pilar tersebut dengan menjalankan prinsip checks and balances," ungkapnya. • **Loe**

DUTA

Cari_aman Di Jalan, Begini Teknik Pengereman yang Baik

SIDOARJO - Berkendara dengan sepeda motor di jalan raya membutuhkan skill yang baik agar aman untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Misalnya, para pengendara perlu menguasai salah satu teknik dasar penting dalam berkendara, yaitu pengereman yang baik.

Berikut tips dari tim Safety Riding PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) distributor sepeda motor Honda wilayah Jatim & NTT yang harus diketahui dan dipelajari oleh para pengguna sepeda motor, baik bagi pemula hingga pengendara yang sudah mahir.

Pengetahuan dasar yang perlu dipelajari adalah mengetahui beragam fitur-fitur sepeda motor yang berhubungan dengan keselamatan berkendara, seperti sistem pengereman, instrumen lampu, kaca spion serta lainnya. Memahami beragam fitur ini sangatlah penting, khususnya bagi pemula

ataupun para pengendara baru untuk mengurangi potensi bahaya saat berkendara bagi diri sendiri ataupun orang lain.

Seperti salah satu pengaplikasian Combi Brake System (CBS) yang ada di sepeda motor matic Honda. Hal itu didasari atas kebutuhan konsumen akan kendaraan yang mampu memberi kenyamanan dan keselamatan lebih baik saat berkendara.

CBS merupakan sistem pengereman yang menggabungkan rem depan dan rem belakang. Hanya dengan menekan tuas rem tangan sebelah kiri/tuas rem belakang maka rem depan dan rem belakang berfungsi secara bersamaan.

1. Latih Penggunaan Rem: Setelah memahami fitur keselamatan berkendara, mulailah pelajari teknik berkendara. Beragam metode latihan dapat dilakukan oleh para pengendara, yakni dengan menggunakan motor statis atau

mesin dalam keadaan mati.

2. Gunakan CBS Secara Konsisten: Saat akan berhenti, biasakan menggunakan rem belakang (tuas rem kiri) yang akan mengaktifkan CBS. Ini akan memastikan kedua roda melakukan pengereman dan mengurangi risiko tergelincir.

3. Hindari Pengereman Mendadak: Meskipun CBS membantu mengurangi risiko terkunci pada roda, pengereman mendadak tetap bisa menyebabkan kehilangan kendali. Sebaiknya, perlambat kendaraan secara bertahap sebelum benar-benar berhenti.

4. Jaga Kecepatan di Tikungan: Saat mendekati tikungan, kurangi kecepatan sebelum memasuki tikungan. CBS akan membantu pengereman lebih stabil, tetapi memiringkan motor saat pengereman bisa berisiko.

5. Perhatikan Kondisi Jalan: CBS bekerja lebih efektif pada jalan yang

kering. Pada kondisi jalan basah atau licin, berhati-hatilah saat menarik tuas rem, karena meski CBS mengurangi risiko terkunci, permukaan licin tetap bisa menyebabkan tergelincir.

6. Gunakan Rem Depan Jika Diperlukan: Meskipun CBS mengaktifkan rem depan dan belakang, terkadang rem depan perlu digunakan lebih intensif, terutama saat mengerem dari kecepatan tinggi. Jangan ragu untuk menggunakan rem depan secara bersamaan, tetapi tetap dengan kontrol yang baik.

"Kemampuan berkendara yang aman perlu diasah secara rutin sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan saat menghadapi berbagai situasi di jalan raya. Simulasi berbagai situasi jalan raya ini dapat ditemukan di pusat pelatihan keselamatan berkendara yang dimiliki oleh MPM Honda Jatim yaitu MPM Safety Riding

Center yang terletak di Sidoarjo. MPM Safety Riding Center merupakan salah satu sarana pelatihan berkendara untuk mengenal cara berkendara sepeda motor agar berkendara dengan Cari_aman yang dilengkapi berbagai dengan fasilitas pembelajaran, seperti keseimbangan, cornering dan slalom, pengereman, tanjakan dan turunan, hingga melatih berkendara dengan simulasi rambu lalu lintas." kata Suhari, Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim.

Selain itu, pengendara juga dapat berlatih menggunakan dengan alat simulasi berkendara seperti Honda Riding Trainer (HRT) yang ada di jaringan dealer Honda wilayah Jatim & NTT agar dapat berlatih teknik dasar berkendara dan meningkatkan pemahaman tentang keselamatan berkendara secara aman dan efektif. • **Imm**

DUTA

PKPU Pilkada 2024 Sesuai Putusan MK

■ Kaesang Gagal Nyalon di Pilgub, Tapi Masih Bisa Maju Wali Kota

Jakarta-HARIAN BANGSA

Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu

❖ Bersambung ke Hal. 11



Suasana rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR tentang pentetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

HARIAN
BANGSA

Koran Warga Jatim

● PKPU...

Sambungan dari halaman 1

telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi.

"Kami sudah memenuhi janjiku. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, KPU, dan pemerintah dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Doli mengatakan disetujuinya rancangan PKPU yang mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

"Jadi, insyaallah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Doli berharap Rancangan PKPU No-

mor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat langsung disahkan pula pada Ahad ini.

"Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segera diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratnan Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum menyusul unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengunggulkan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin KPU dan Kemenkumham langsung kejar tayang melakukan rapat harmonisasi PKPU.

"Nanti siang atau sore kami akan harmonisasi dengan Kemenkumham dan akan segera diundangkan. Setelah itu kita sampaikan ke publik," kata Afifuddin di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).

Afifuddin menegaskan seluruh usulan yang KPU dengan hasil keputusan MK telah disampaikan ke DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat (RDP).

"Intinya, semua usulan KPU soal perubahan untuk mengadopsi putusan MK 60 dan 70 sudah dilakukan dan sudah diterima seluruhnya," kata Afifuddin.

Afifuddin meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggara pemilu dalam waktu singkat akan mengesahkan PKPU Pilkada.

"Setelah harmonisasi, insya Allah secepatnya karena memang kita ingin proses dilakukan secepatnya karena situasi dan kebutuhan pendaftaran yang semakin dekat," tutup Afifuddin.

Sementara itu, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dipastikan gagal maju dalam pemilihan gubernur (pilgub) 2024 sebab terganjal putusan MK terkait syarat batas usia calon kepala daerah.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta Pilkada oleh KPU.

Sehingga, dengan adanya putusan ini Kaesang tidak dapat mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 karena belum berusia 30 tahun saat penetapan pasangan calon oleh KPU, yaitu pada 22 September 2024. Dia baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024.

Sebelumnya, anak Jokowi ini dikabarkan akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah sebagai calon wakil gubernur, mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju plus atau KIM plus.

Meski gagal maju di Pilkada, berdasarkan aturan yang sama Kaesang masih bisa mencalonkan diri sebagai Wakil kota atau Bupati. Mengacu pada putusan terbaru MK, syarat batas usia calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 25 tahun, artinya Kaesang masih memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri. (rmol/det/cnn/rol/kcm/lan)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Demo di DPRD Sidoarjo, Mahasiswa IMM Tuntut Parlemen Tak Ingkar Putusan MK

Editor: Fathur Roziq

22 Agt 2024 21:21



Ketua Sementara DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menerima aspirasi mahasiswa di depan lobi kantor DPRD Sidoarjo pada Kamis (22/8/2024). (Foto: Istimewa)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Rakyat bergolak. Merespons gejolak politik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan pencalonan kepala daerah, puluhan mahasiswa berdemonstrasi. Mereka bertekad mengawal keabsahan konstitusi.

Puluhan anak muda dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo itu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sidoarjo. Mereka mendesak DPR RI untuk menghormati putusan MK. Tidak menyusun penafsiran sendiri atas putusan MK terkait UU Pilkada.

Satu per satu aktivis IMM Sidoarjo menyampaikan orasi. Aksi mereka didengar oleh Ketua Sementara DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, anggota DPRD M, Nizar dan Warih Andono, serta Zahlul Yussar.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Mereka memutuskan menghentikan sejenak aksi karena mendengar adzan Ashar dari Masjid Agung Sidoarjo. Peserta aksi pun memutuskan sholat berjamaah.

"Kami mengingatkan anggota dewan bahwa kita semua ini bertuhan. Jangan semena-mena. Karena yang paling berkuasa adalah Tuhan," ujar Ketua PC IMM Sidoarjo Thoriqul Aslam pada Kamis (22/8/2024).

Puluhan massa mahasiswa itu lantas masuk ke halaman kantor DPKU Sidoarjo. Anggota DPRD Sidoarjo tampak menunggu. Mahasiswa diajak berdialog. Abdillah Nasih, M Nizar, Warih Andono, dan Zahlul Yussar mendengar. Kemudian menanggapi aspirasi para mahasiswa.

"Kami sangat mengapresiasi masukan-masukan dari masyarakat. Kami ingin Sidoarjo ini menjadi kota yang aspiratif," kata Abdillah Nasih lewat megafone di depan para mahasiswa.

Thoriqul kemudian meminta para anggota dewan menandatangani surat tuntutan mahasiswa IMM sebagai bukti bahwa DPRD Sidoarjo akan mengawal isu ini sampai ke DPR RI. Para wakil rakyat pun menandatangani surat bermaterai itu. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

● PDIP...

Sambungan dari halaman 1

Kedelapan partai ini ialah PDIP, PKB, Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Demokrat.

Hal itu diumumkan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno yang diadakan di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8/2024). "Menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi

ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR dalam Pemilu tahun 2024," kata Afif dalam rapat itu.

Berikut ini partai yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas (sesuai nomor urut parpol) :

1. PKB: 16.115.358 (memenuhi ambang batas)
2. Gerindra: 20.071.345 (memenuhi)
3. PDIP: 25.384.673 (memenuhi)
4. Golkar: 23.208.488 (memenuhi)
5. Nasdem: 14.660.328 (memenuhi)
6. Partai Buruh: 972.898 (tidak memenuhi)
7. Partai Gelombang Rakyat In-

donesia: 1.282.000 (tidak memenuhi)

8. PKS: 12.781.241 (memenuhi)

9. PKN: 326.803 (tidak memenuhi)

10. Hanura: 1.094.599 (tidak memenuhi)

11. Partai Garda Republik Indonesia: 406.884 (tidak memenuhi)

12. PAN: 10.984.639 (memenuhi)

13. PBB: 484.487 (tidak memenuhi)

14. Demokrat: 11.283.053 (memenuhi)

15. PSI: 4.260.108 (tidak memenuhi)

16. Perindo: 1.955.13 (tidak memenuhi)

17. PPP: 5.878.708 (ti-

dak memenuhi)

18. Partai Ummat: 642.550 (tidak memenuhi)

Dari penghitungan KPU, jumlah semua suara sah partai politik peserta pemilu mencapai 151.793.293. Adapun jumlah kursi tiap partai yang lolos di DPR RI (total 580 kursi) ialah:

- PKB: 68 kursi (11,72 persen)
- Gerindra: 86 kursi (14,83 persen)
- PDIP: 110 kursi (18,97 persen)
- Golkar: 102 kursi (17,59 persen)
- Nasdem: 69 kursi (11,90 persen)
- PKS: 53 kursi (9,14 persen)
- PAN: 48 kursi (8,28 persen)
- Partai Demokrat: 44 kursi (7,59 persen). (/)

CS Berita Bango Bangsa

HARIAN
BANGSA

Koran Warga Jatim

● PDIP...

Sambungan dari halaman 1

Kedelapan partai ini ialah PDIP, PKB, Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Demokrat.

Hal itu diumumkan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno yang diadakan di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8/2024). "Menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi

ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR dalam Pemilu tahun 2024," kata Afif dalam rapat itu.

Berikut ini partai yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas (sesuai nomor urut parpol) :

1. PKB: 16.115.358 (memenuhi ambang batas)
2. Gerindra: 20.071.345 (memenuhi)
3. PDIP: 25.384.673 (memenuhi)
4. Golkar: 23.208.488 (memenuhi)
5. Nasdem: 14.660.328 (memenuhi)
6. Partai Buruh: 972.898 (tidak memenuhi)
7. Partai Gelombang Rakyat In-

donesia: 1.282.000 (tidak memenuhi)

8. PKS: 12.781.241 (memenuhi)

9. PKN: 326.803 (tidak memenuhi)

10. Hanura: 1.094.599 (tidak memenuhi)

11. Partai Garda Republik Indonesia: 406.884 (tidak memenuhi)

12. PAN: 10.984.639 (memenuhi)

13. PBB: 484.487 (tidak memenuhi)

14. Demokrat: 11.283.053 (memenuhi)

15. PSI: 4.260.108 (tidak memenuhi)

16. Perindo: 1.955.13 (tidak memenuhi)

17. PPP: 5.878.708 (ti-

dak memenuhi)

18. Partai Ummat: 642.550 (tidak memenuhi)

Dari penghitungan KPU, jumlah semua suara sah partai politik peserta pemilu mencapai 151.793.293. Adapun jumlah kursi tiap partai yang lolos di DPR RI (total 580 kursi) ialah:

- PKB: 68 kursi (11,72 persen)
- Gerindra: 86 kursi (14,83 persen)
- PDIP: 110 kursi (18,97 persen)
- Golkar: 102 kursi (17,59 persen)
- Nasdem: 69 kursi (11,90 persen)
- PKS: 53 kursi (9,14 persen)
- PAN: 48 kursi (8,28 persen)
- Partai Demokrat: 44 kursi (7,59 persen). (/)

CS Berita Bango Bangsa

HARIAN
BANGSA

Koran Warga Jatim



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PEMKAB SIDOARJO TANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA BUMN DAN BUMD PADA SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH



Redaksi 3 Min Baca
23 Agustus 2024



RepublikNews
republiknews.com | Adil dan Beradab

Foto : Atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo pit Bupati Sidoarjo menandatangani perjanjian kerjasama BUMN dan BUMD di Gedung Juang lantai 3, Gedung Merah Putih Jakarta Selatan

Republiknews.com, Sidoarjo. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Stranas PK tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, salah satunya adalah aksi Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN-BUMD).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Untuk mewujudkan pelaksanaan aksi ini Stranas PK mendorong sinergitas BUMN dan BUMD melalui kerjasama pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah.



Kabupaten Sidoarjo termasuk 7 pemerintah daerah yang turut dalam acara tersebut. Pemerintah daerah yang diundang ini dinilai telah berhasil menjual produk hasil olahan sampah melalui RDF (Refuse Derived Fuel).

Atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Plt.Bupati Sidoarjo H.Subandi SH.,M.Kn menandatangani perjanjian Kerjasama BUMN dan BUMD, Kamis (22/8) pada sektor pengelolaan sampah, di Gedung Juang Lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta selatan.

Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Koordinator Stranas PK, Pahala Nainggolan, yang juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Kegiatan ini merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD).

Aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah. Selain penandatanganan perjanjian kerjasama, acara juga diisi dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri BUMN, untuk mengajak lebih banyak Kerjasama BUMN BUMD diseluruh daerah di Indonesia.



Datangi Polresta Sidoarjo, DPC PKB Koordinasi Cegah Gangguan Keamanan terhadap Peserta Muktamar PKB di Bali

Editor: Fathur Roziq

23 Agt 2024 13:47



Sekretaris DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih (kiri) menyampaikan maksud kedatangan kepada Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo Kumpul Awaludin Wijaya pada Jumat (23/8/2024). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. DPC PKB Sidoarjo berkoordinasi dengan Polresta Sidoarjo untuk menjamin kelancaran keberangkatan dan mencegah gangguan terhadap peserta muktamar. Ada indikasi yang berniat tidak baik.

Para pengurus DPC PKB Sidoarjo itu datang ke Mapolresta Sidoarjo sekitar pukul 10.00. Sekretaris DPC PKB Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin rombongan. Dia didampingi oleh jajaran wakil ketua, wakil sekretaris, dan pengurus-pengurus lainnya. Di antaranya, H Usman, Dhamroni Chudlori, Ainun Jariyah, Elok Suciati, Pujiono, Syihabuddin, serta legislator PKB di DPRD Sidoarjo Abud Asrori, Atok Ashari, serta Sutaji.

"Kami menjalankan perintah DPP PKB untuk selalu berkoordinasi dengan keamanan, termasuk Polresta Sidoarjo. Khususnya terkait muktamar," kata Abdillah Nasih.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Jajaran pengurus DPC PKB Sidoarjo mendatangi kantor Sat Intelkam Polresta pada Jumat (23/8/2024). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Sampai di gedung Sat Intelkam Polresta Sidoarjo, para petinggi DPC PKB Sidoarjo itu disambut petugas intel. Mereka diterima langsung oleh Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo Kopol Awaludin Wijaya. Abdillah Nasih lantas menyampaikan maksud kedatangan bersama koleganya.

"Kami datang juga untuk laporan dan antisipasi agar tidak ada provokasi dan upaya penjegalan saat keberangkatan ke Muktamar PKB di Bali," tambah legislator PKB di DPRD Sidoarjo itu di depan gedung SPKT Polresta Sidoarjo pada Jumat (23/8/2024)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Abdillah Nasih menambahkan, PKB masih trauma dengan adanya konflik internal yang terjadi beberapa tahun silam. Untuk itu, saat ini, DPP PKB meminta untuk selalu berkoordinasi soal keamanan. Jangan sampai apa yang terjadi di pusat merembet hingga ke daerah.

Mengapa? Menurut Abdillah Nasih, dalam beberapa hari terakhir di daerah-daerah muncul indikasi gangguan terhadap peserta muktamar yang akan berangkat ke Bali. Di Sidoarjo hal itu tidak boleh terjadi.

"Kami yakin, insya Allah Sidoarjo sangat-sangat kondusif. Hubungan kami dengan pihak lain sangat bagus," ungkapnya.

Namun, tidak ada salahnya PKB Sidoarjo melakukan langkah-langkah antisipasi. Koordinasi dengan pihak keamanan ini sebagai langkah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sekaligus menjaga kondusivitas Sidoarjo.

Rombongan PKB Sidoarjo mulai berangkat Jumat malam ini dengan bus ke Bali. Menyusul besok, peserta aktifnya dan rombongan-rombongan lainnya. Baik pengurus maupun pribadi-pribadi selaku simpatisan.

Abdillah Nasih menyatakan, DPC PKB Sidoarjo tetap berkomitmen membawa hasil pleno DPC PKB Sidoarjo pada Rabu (14/8/2024) lalu. PKB Sidoarjo menyatakan tetap bulat mencalonkan Dr Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB. Itu merupakan keputusan Mustasyar, Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, serta jajaran PAC PKB dan badan otonom se-Sidoarjo.

Ke depan, diharapkan PKB benar-benar menjadi milik bangsa dan mengusung visi Kenusantaraan, *ahlus sunnah wal jamaah* tetap menjadi prioritas. "Serta tetap berkhidmat kepada para kiai," tambah Abdillah Nasih. (*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Suyarno Sebut DPP PDI-P, Mantab Usung Mas Iin dan Edy Widodo di Pilbup Sidoarjo 2024

bidik · 3 hari ago

0 164 1 minute read

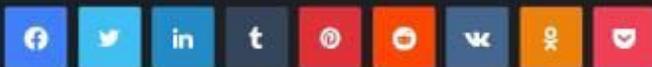


Foto: Suyarno

Bendahara DPC PDI-P Kabupaten Sidoarjo, Suyarno saat ditemui didepan DPRD Kabupaten Sidoarjo. (Foto: Teddy Syah Roni/Bidiknasional.com)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi mengusung pasangan Achmad Amir Aslichin (Mas Iin) dan Edy Widodo dalam kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Sidoarjo tahun 2024.

Pemberian restu pasangan ini dilakukan PDIP saat melakukan siaran langsung lewat chanel YouTube PDIP dengan tajuk Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tahap 2 di Jakarta, Kamis (22/8).

Pengumuman rekomendasi kepada pasangan ini secara tak langsung memperkokoh posisi Mas Iin dan Edy dalam peta politik Sidoarjo.

Bendahara DPC PDI-P Kabupaten Sidoarjo Suyarno saat ditemui didepan DPRD Kabupaten Sidoarjo mengatakan, DPP PDI-P sudah ada nama yang mengurucut, Mas Iin dan Pak Edy Widodo.

"Benar kemarin saya mengikuti pengumuman DPP PDI-P, sudah ada nama yang mengerucut, yaitu Mas Iin dan Pak Edy Widodo," ujarnya, Jumat (23/8).

Namun demikian hingga hari ini DPC PDI-P masih menunggu bentuk fisik dari surat rekomendasi partai.

"Tinggal menunggu jatuhnya rekomendasi (bentuk fisik) ke DPC, dengan begitu baru clear and clean," lanjutnya.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Disinggung terkait kapan surat datang, ia hanya memastikan sebelum pendaftaran. "Yang pasti nanti tanggal 26 Agustus 2024

suratnya pasti sudah ada di DPP, karena tanggal 27 Agustus sudah masa pendaftaran calon, jelasnya.

"Siapapun nanti yang diusung, PDI-P tetap satu komando tegak lurus apapun yang diputuskan oleh DPP PDI-P, kami yang di daerah bakal mengusahakan yang terbaik," tutupnya.

Langkah Mas Iin, putra kandung mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kini bisa dibilang semakin mantab. Meski ia berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) namun justru PAN dan PDI-P yang terlebih dahulu mengumumkan namanya yang bakal diusung. Hal ini akan semakin menarik, lantaran hingga kini PKB belum mengumumkan calon yang diusung.

Mereka dinilai masih memiliki kebimbangan antara memilih H Subandi yang kini menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo atau memilih Mas Iin untuk diusung. (Ted)



Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Sidoarjo, Tuntut Penolakan Revisi RUU Pilkada



Agus Sutopo
23 Agustus 2024



Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPRD Sidoarjo, Tuntut Penolakan Revisi RUU Pilkada



Sidoarjo – News PATROLI.COM –

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sidoarjo kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sidoarjo pada Jumat (23/8). Mereka menentang revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Massa aksi, yang terdiri dari berbagai organisasi seperti PMII Sidoarjo, Gusdurian, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, Pemuda Katolik, dan IPNU IPPNU, tiba di Gedung DPRD Sidoarjo sekitar pukul 13.00 WIB setelah melakukan long march dari GOR Sidoarjo. Dalam perjalanan, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta melakukan orasi yang menggema sepanjang jalan.

Setibanya di depan gedung DPRD, kelompok mahasiswa segera melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka. Suasana sempat memanas ketika terjadi dorong-mendorong antara massa aksi dan petugas keamanan yang berusaha menghalangi mereka memasuki area gedung. Meski mendapat perlawanan, massa akhirnya berhasil memasuki halaman gedung setelah beberapa anggota dan Wakil Ketua Sementara DPRD menerima mereka.



Di dalam halaman gedung, massa bertemu dengan perwakilan DPRD Sidoarjo.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ananto Ihlil Bachtiar, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk kekecewaan mendalam terhadap revisi RUU Pilkada yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. "Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa suara kami didengar. Kami tidak ingin demokrasi yang sudah susah payah kita bangun dirusak oleh revisi yang tidak berpihak pada rakyat," tegas Ananto.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mahasiswa Sidoarjo Gelar Aksi Protes Revisi RUU Pilkada, Desak DPRD Bertindak

Redaksi
Agustus 23, 2024



SIDOARJO – Gelombang protes dari kalangan mahasiswa kembali mengemuka di depan Gedung DPRD Sidoarjo. Jumat (22/08/2024).

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sidoarjo turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dengan massa melakukan long march dari GOR Sidoarjo menuju Gedung DPRD. Berbekal spanduk dan poster berisi tuntutan, para mahasiswa berjalan tertib namun penuh semangat, menarik perhatian warga sekitar.

Setibanya di depan Gedung DPRD Sidoarjo, massa yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gusdurian, Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila, Pemuda Katolik, serta IPNU-IPPNU, langsung menggelar orasi. Dalam orasi tersebut, mereka menyuarakan kekecewaan atas revisi RUU Pilkada, yang mereka anggap sebagai langkah mundur dalam proses demokrasi di Indonesia.

Ketegangan sempat terjadi ketika massa mencoba membuka gerbang gedung DPRD, namun dihalangi oleh pihak keamanan. Dorong-dorongan antara mahasiswa dan petugas keamanan terjadi, namun situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden besar. Setelah sempat dihadang, massa akhirnya berhasil memasuki halaman gedung dan menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada perwakilan DPRD Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ananto Ihlil Bachtiar, Koordinator Lapangan aksi, menegaskan bahwa tuntutan mereka harus mendapatkan perhatian serius.

“Kami datang ke sini bukan hanya untuk berteriak, tetapi untuk memastikan bahwa suara kami didengar dan ditindaklanjuti. RUU Pilkada yang diusulkan ini mencederai semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan bersama,” ujarnya dengan tegas.

Ananto juga menyampaikan lima poin utama tuntutan mereka. Pertama, mengecam DPR RI yang dianggap telah mengkhianati konstitusi dengan mengajukan revisi RUU Pilkada. Kedua, mendesak pemerintah untuk segera menolak dan menghentikan proses revisi tersebut. Ketiga, meminta para pemimpin partai politik dan elit nasional untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga demokrasi. Terakhir, mereka menuntut agar DPRD Sidoarjo berperan aktif

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

dalam mengawal tuntutan ini hingga tuntas.

Meski telah mendapatkan komitmen dari DPRD Sidoarjo, Ananto menegaskan bahwa aksi ini belum akan berhenti.

“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini janji kami untuk terus memperjuangkan demokrasi di negeri ini,” ujarnya.

Aksi mahasiswa ini mendapat respons dari Wakil Ketua Sementara DPRD Sidoarjo, Suyarno. Dalam pertemuan singkat dengan perwakilan massa, Suyarno menyatakan bahwa DPRD mendukung aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI.

“Kami sepakat dengan gerakan mahasiswa terkait RUU Pilkada ini. Kami tidak ingin demokrasi kita tercederai oleh kebijakan yang tidak sesuai konstitusi. Kami akan mengawal ini hingga tuntas,” tegasnya.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Dhamroni Chudlori, anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dhamroni menyatakan bahwa fraksinya mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi, dan komitmen ini akan dibuktikan melalui langkah nyata.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Kami dari Fraksi PKB sangat mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kami akan membuktikan dukungan tersebut dengan tindakan konkret, termasuk penandatanganan sebagai bentuk dukungan resmi,” pungkasnya.



Jembatan Bailey Kedungpeluk Sidoarjo Langsung Dilewati, Pengguna Jalan Berterima Kasih

Editor: Fathur Roziq

23 Agt 2024 16:10



Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Dwi Eko Saptono (kanan) mengecek kondisi jembatan Bailey dan opritnya di sisi barat maupun timur pada Jumat (23/8/2024). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Warga Desa Kedungpeluk lega. Jembatan Bailey sebagai pengganti sementara jembatan yang ambruk pada Selasa (16/7/2024) lalu di desa tersebut sudah jadi. Langsung bisa dilewati pengguna jalan.

Pembangunan jembatan Bailey itu selesai pada Kamis malam (22/8/2024). Jumat pagi (23/8/2024), jembatan selebar sekitar 4 meter dan panjang 24 meter itu sudah digunakan warga. Mereka tidak lagi harus melalui jembatan di atas Dam Kedungpeluk, Kecamatan Candi.

Sekitar pukul 07.30 Jumat, terlihat berbagai kendaraan sudah lalu lalang. Ada sepeda angin, betor, sepeda motor, mobil pikap, truk engkel, maupun mobil Alphard. Akses keluar-masuk dari dan ke Desa Kedungpeluk itu lebih lengang. Mereka bisa melaju lebih cepat. Tidak lagi pelan-pelan seperti jembatan saat lewat jembatan di atas dam.

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono berada di lokasi pada Jumat pagi itu. Dia mengamati dengan cermat kondisi jembatan. Berjalan dari ujung barat ke ujung timur jembatan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Konstruksi jembatan dilihat dengan teliti. Begitu pula *oprit* jembatan Bailey diamati benar. Setelah dari timur jembatan, Dwi Eko berjalan lagi ke bagian barat jembatan.

"Saya kira jembatan ini sudah cukup baik," ungkap Dwi Eko saat berada di *oprit* jembatan Bailey.

Menurut dia, *oprit* jembatan sudah bagus. Kemiringannya sudah landai. Aspalnya juga halus. Tingkat kekerasannya juga baik. Dia mempersilakan warga untuk melewatinya. Tanpa harus menunggu peresmian atau apa pun.

"Sudah bisa dilalui, kecuali untuk truk-truk besar," ungkap Dwi Eko.



Mobil sedan melewati jembatan Bailey Kedungpeluk yang sudah selesai dibangun dan bisa langsung dilewat. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Selesaiya pembangunan jembatan Bailey itu disambut lega pengguna jalan. Hariyanto, pengendara motor yang lewat di jembatan Bailey, langsung mengegas motornya naik. Sebelumnya, dia harus pelan-pelan setiap kali lewat jembatan di atas dam.

"Seneng sekali. Bisa lewat cepat riwa-riwinya. Terima kasih jembatan sudah jadi," ungkap lelaki 37 tahun asal Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, itu.

Bagaimana dengan rencana membangun jembatan baru yang permanen? Dwi Eko mengatakan, jembatan permanen itu diperkirakan tuntas sekitar 5 bulan lagi. Saat ini berlangsung pemilihan pelaksananya. Setelah itu, pelaksanaan diperkirakan butuh waktu sekitar 3 bulan.

"September, Oktober, November, insya Allah tidak sampai akhir tahun bisa selesai," terangnya.

Menurut rencana, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan permanen itu sekitar Rp 2,4 miliar. Konstruksi jembatan menggunakan *double U-dith box* (DUB). Lebar jembatan direncanakan 7 meter. Panjang sekitar 21 meter. Jembatan baru itu dirancang untuk mampu menahan beban di atas 30 ton.

"Kekuatan jembatan permanen mampu bertahan 40 tahun, bahkan 50 tahun," tambah Dwi Eko. (*)

